



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

http://kliping.dpr.go.id

Judul	: Guna mempermudah akses KPR, pemerintah wacanakan hapus kredit macet di bawah Rp 1 juta
Tanggal	: Sabtu, 18 Oktober 2025
Surat Kabar	: Rakyat Merdeka
Halaman	: 2

Guna Mempermudah Akses KPR

Pemerintah Wacanakan Hapus Kredit Macet Di Bawah Rp 1 Juta

Pemerintah memiliki wacana penghapusan kredit macet di bawah Rp 1 juta bagi calon pembeli rumah dengan skema Kredit Perumahan Rumah (KPR) yang akan dilakukan agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tetap bisa mengajukan KPR. Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Perkotaan (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berbagai kendala yang dihadapi sebagian perumahan, yang salah satunya adalah Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dikeluhkan para pengembang. "Pak Menku berkenan untuk

membantu nanti kebijakan dengan OJK, sehingga nanti dari segi demand perumahan bisa terselesaikan," ujar prabu akbar di Balai Ara ini Selasa (14/10/2025). Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya mengungkapkan, usulan tersebut muncul setelah Menteri PKP Maruarar Sirait melaporkan bahwa para pengembang perumahan bersedia menanggung tunggakan kredit yang dimiliki calon pembeli rumah.

"Kata Pak Ara sih pengembangnya mau bayar itu. Kalau itu mau bayar ya sudah enggak apa-apa," kata Purbaya, di kawasan JS Luwansa, Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Dia menjelaskan, permohonan kredit rumah dengan skema KPR sangat besar. "Katanya ada demand yang dari sekitar 100.000 orang yang bisa membuat mereka mereka masih di-blacklist karena punya pinjaman yang belum dibayar," katanya. Meski demikian, Purbaya menegaskan bahwa dia akan terlebih dahulu melakukan pembiacaraan dengan melibatkan Bapenda dan Otoritas Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan SLIK OJK. Menurut dia, kebijakan tersebut akan mempermudah orang untuk dapat rumah maupun untuk hal-hal lain yang berurusan dengan perbankan.

"Karena SLIK OJK atau dulu bernama BI Checkup, digunakan untuk memastikan sih ada akreditasi baik digunakan untuk perumahan maupun untuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dan KUR (Kredit Usaha Rakyat)," ujar Fauzi.

Tapi tergantung dari temuan hari Senin," ucap Purbaya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi XI Fauzi Amro mendukung wacana penghapusan kredit di bawah Rp 1 juta pada SLIK OJK. Menurut dia, kebijakan tersebut akan mempermudah orang untuk dapat rumah maupun untuk hal-hal lain yang berurusan dengan perbankan.

"Karena SLIK OJK atau dulu bernama BI Checkup, digunakan untuk memastikan sih ada akreditasi baik digunakan untuk perumahan maupun untuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dan KUR (Kredit Usaha Rakyat)," ujar Fauzi.

kepada Rakyat Merdeka, Jumat (17/10/2025).

Sementara itu, Sekretaris Yayasan Lembaga Konsultasi Indonesia (YLIK) Rio Priambodo menilai usulan ini belum tentu masyarakat. Tetapi, dia meminta Pemerintah untuk mengajaknya terlebih dahulu. "Harus jelas kriteria seperti apa penerima dari penghapusan kredit ini," ujar Rio kepada Rakyat Merdeka, Kamis (16/10/2025).

Untuk mengetahui pandangan Fauzi Amro dan Rio Priambodo mengenai wacana penghapusan kredit Rp 1 juta untuk calon pembeli rumah dengan skema KPR, berikut wawancaranya.

FAUZI AMRO, Wakil Ketua Komisi XI DPR

Sasarannya Untuk Harus Jelas Kriteria Menengah Ke Bawah Calon Penerimanya



“
Sasaran kebijakan ini memang untuk masyarakat menengah ke bawah.

RIO PRIAMBODO, Sekretaris YLIK

Harus Jelas Kriteria Calon Penerimanya



“
Pemerintah perlu menerbitkan aturan atau petunjuk teknis pelaksanaan agar tidak bias.

Apa pandangan Anda dengan usulan penghapusan kredit macet simpani 1 juta bagi calon pembeli rumah dengan skema KPR?

Secara pribadi, saya mendukung ya. Dulu kita juga menyampaikan agar masyarakat menengah ke bawah bisa mendapatkan kredit macet simpani 1 juta, dilulus saja SLIK OJK-nya.

Artinya ini semacam ini sudah benar ada ya?

Sudah ada. Dulu kan namanya hapus bukti denda kredit target PDR. Kita lakukan target di bawah Rp 1 juta. Memang syaratnya cukup rumit karena pengajuan penghapusan itu harus sudah dijalankan hingga tahun sebelumnya. Tapi sekarang kalau misalnya ada yang di bawah Rp 1 juta yang bermasalah SLIK OJK-nya, sebaiknya semuanya dihapuskan. Karena

tujuannya agar masyarakat lebih mudah mendapatkan rumah, lebih mudah berusaha, dan lebih mudah mendapatkan perumahan.

“Tidak ada kredit seperti apa ya?

Tentu harus dilihat juga pertama-

kananya seperti apa. Karena itu, Ke-

menterian Keuangan, Bank Bimbara

(Himpunan Bank Negara) dan OJK

harusnya berkoordinasi.

Hanya saja banyak nasabah yang

bermasalah pada SLIK OJK-nya

yang bukan penerima kredit macet

maupun KUR. Sesuai kebijakan ini

memang untuk masyarakat menengah

ke bawah.

Apakah program ini akan men-

dukung program pengadaan tiga

juta unit rumah?

Target Pemerintah pada program tiga juta unit rumah tergantung slippengembangan, hasil di perkotaan, persenan masukan di Kawasan Selatan. Nah kalau banyak masyarakat yang terkena akibat SLIK OJK, tentu target tiga juta unit rumah ini tidak akan tercapai dan yang sama berlaku untuk UMKM. Karena itu, kami berharap Pemerintah segera merespons penghapusan kredit macet sebesar maksimal Rp 1 juta dan kami akan ikut mengawasinya.

Bagaimana dengan yang lebih dari Rp 1 juta?

Ibu tidak bisa, karena batas maksimalnya memang Rp 1 juta. Tujuannya agar pembaharuan ekonomi meningkat, pembaharuan perumahan lebih lancar, dan pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah ikut meningkat. ■ NNM

Apa pandangan Anda dengan usulan penghapusan kredit macet maksimalnya 1 juta bagi calon pembeli rumah dengan skema KPR?

Tentunya, YLIK sangat setuju terkait dengan hal ini. Karena akhirnya masyarakat akan mendapat pembaharuan rumah. Namun, sebelum dilaksanakan, Pemerintah harus janggil Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perbankan terlebih dahulu.

Untuk pelaksanaannya, apa yang perlu diperhatikan?

Pastinya terkait karakteristik konsumen yang ingin dihapus hutang atau kreditnya itu.

Dengan maksimal kredit macet di angka Rp 1 juta, Anda setuju?

YLIK mendorong bahwa kelas menengah ke bawah bisa menjadi prioritas jika benar program ini dilaksanakan.

Apakah Andea kepada Pemerintah agar program ini bisa terlaksana dengan baik?

Pemerintah perlu menerbitkan aturan perihal teknis pelaksanaan agar tidak bias. Selain itu, pada kasus Covid-19, yang pada saat itu Pemerintah memberi relaksasi kredit dengan aturan yang jelas.

Lantas apa harapan Anda kepada Pemerintah terkait wacana program ini?

YLIK meminta program ini segera dilaksanakan sebelum akhir tahun 2025.

Adakah catatan lain dari Anda terkait wacana kebijakan ini?

Harus diaturatau juga di balik mungkin saja konsumen yang huatangnya macet tersebut bukan karena tidak ada kemampuan bayar.

Ters apa alasannya?

Hal itu terjadi karena proyek dari pemerintahnya mangkrak atau terdapat masalah dalam pembangunannya. Sehingga konsumen memiliki beban menganggur.

Artinya, kredit macet bisa terjadi akibat perumahannya mangkrak?

Iya. Walaupun program ini akan sangat menguntungkan konsumennya. Apalagi bagi kredit macet karena kesalahan dari developer yang gagal bangun. ■ NNM